

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA PEKANBARU**



OLEH:

ROY AL AMIN

155311014

JURUSAN AKUNTANSI S1

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan
Telp (0761) 674681 fax.(0761) 674834 Pekanbaru – 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ROY AL AMIN
NPM : 155311014
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI – S1
JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI
KOTA PEKANBARU.**

Disahkan Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Drs. H. Abrar, Msi., Ak., CA


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1


Drs. H. Abrar, Msi., Ak., CA


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

ROY AL AMIN

155311014

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pekanbaru. Responden dalam penelitian ini yaitu direktur, manajer/kepala bagian sistem pengendalian internal, dan manajer/kepala bagian akuntansi pada masing-masing bank dengan jumlah keseluruhan sebanyak 48 responden yang akan menjawab kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas data. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* digunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru sebesar 53,90% sedangkan 46,10% ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance.*

The purpose of this study was to examine the effect of the Internal Control System on the implementation of Good Corporate Governance in Rural Credit Banks in Pekanbaru City. The population in this study is the Rural Credit Bank (BPR) in Pekanbaru City. Respondents in this study are directors, managers / heads of internal control systems, and managers / heads of accounting at each bank with total of 48 respondents who will answer the questionnaire. This research uses census method. Testing the quality of the data used is validity, reliability and data normality tests. To test the effect of the Internal Control System on the implementation of Good Corporate Governance, regression analysis is used. The results of this study indicate that the Internal Control System has a significant effect on the implementation of Good Corporate Governance in the Rural Credit Bank in Pekanbaru by 53.90% while 46.10% is determined by other factors outside this research model.

Keywords: *Internal Control System, Good Corporate Governance.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru”**.

Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, setulus hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Saya, **(Bapak) Afrinal dan (Ibu) Despi Rahmi** yang memberikan penulis cinta dan kasih sayang, kesabaran, perhatian, semangat, dukungan moril maupun materil, dan doa yang tidak pernah henti dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah sampai selesai. Serta kepada kakak saya Nadya Fitriana dan Fellyana Putri yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih , M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau..
7. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
8. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
9. Pimpinan dan seluruh staf karyawan Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di Kota Pekanbaru.
10. Buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan kasih sayang dan anugerah kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Amin.

Penulis berharap semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk skripsi ini.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

ROY AL AMIN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	9
A. Telaah Pustaka	9
1. Pengendalian Internal	9
2. Komponen Pengendalian Internal	11
3. Keterbatasan Pengendalian Internal.....	13
4. <i>Good Corporate Governance</i>	13
5. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	15
6. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	16

7. Unsur-Unsur <i>Corporate Governance</i>	17
8. Model <i>Corporate Governance</i>	17
9. Dampak Tidak Dilaksanakan <i>Good Corporate Governance</i>	18
10. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	18
11. Penelitian Terdahulu	19
12. Model Penelitian	20
B. Hipotesis	21
BAB III : METODE PENELITIAN.....	22
A. Objek Penelitian.....	22
B. Operasionalisasi Variabel Penelitian	22
C. Populasi dan Sampel.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Analisis Data	26
F. Uji Kualitas Data	28
G. Pengujian Hipotesis	29
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	31
A. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat	31
B. Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat	35

C. Aktivitas Bank Perkreditan Rakyat	36
D. Asas dan Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat	37

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

A. Deskripsi Responden	39
B. Statistik Deskriptif	40
C. Uji Kualitas Data	41
D. Uji Asumsi Klasik.....	42
E. Analisis Data	45
F. Pengujian Hipotesis	46
G. Pembahasan Hasil Penelitian	46
H. Koefisien Determinasi	48

BAB VI : PENUTUP..... 49

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

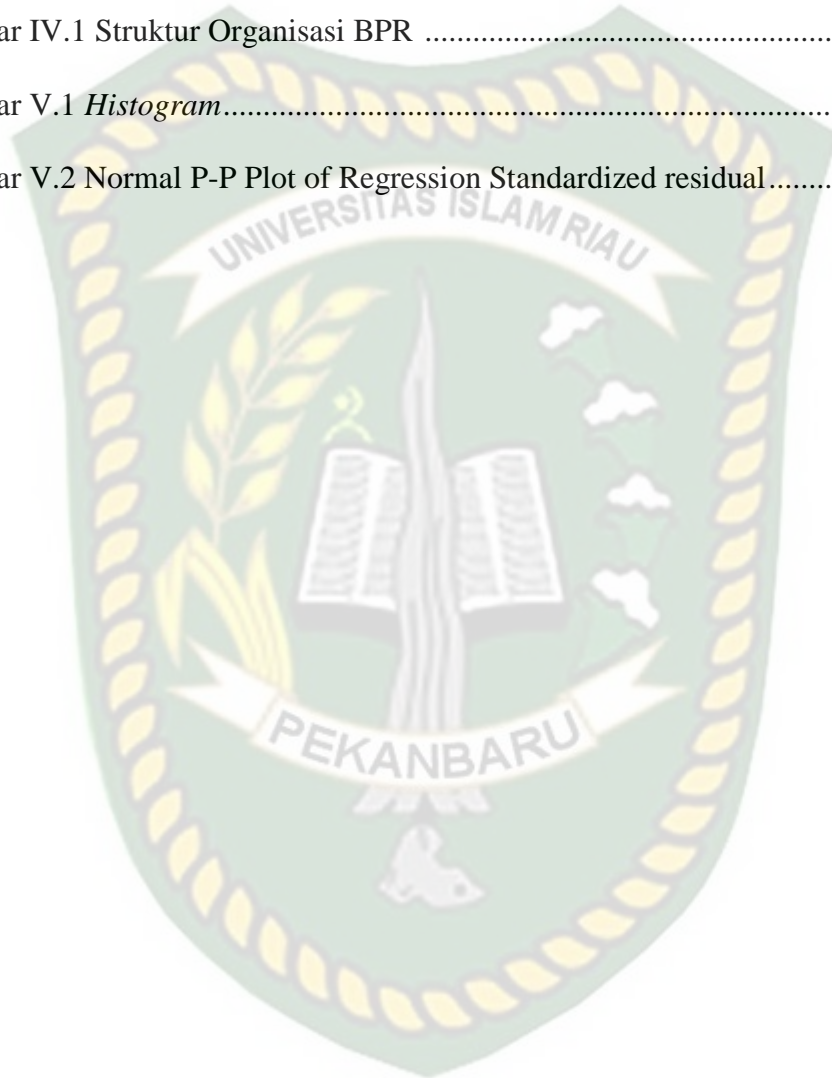
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	23
Tabel III.2 Populasi Penelitian	25
Tabel V.1 Tingkat Pengumpulan Kuesioner	39
Tabel V.2 Demografi Responden	40
Tabel V.3 <i>Descriptive Statistics</i>	41
Tabel V.4 Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel V.5 Hasil Uji Reabilitas Data.....	42
Tabel V.6 <i>One sample-Kolmogorov Smnirrnov Test</i>	44
Tabel V.7 Hasil Analisis Regresi	45
Tabel V.8 Koefisien Determinasi	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Penelitian.....	20
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPR	35
Gambar V.1 <i>Histogram</i>	43
Gambar V.2 Normal P-P Plot of Regression Standardized residual.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

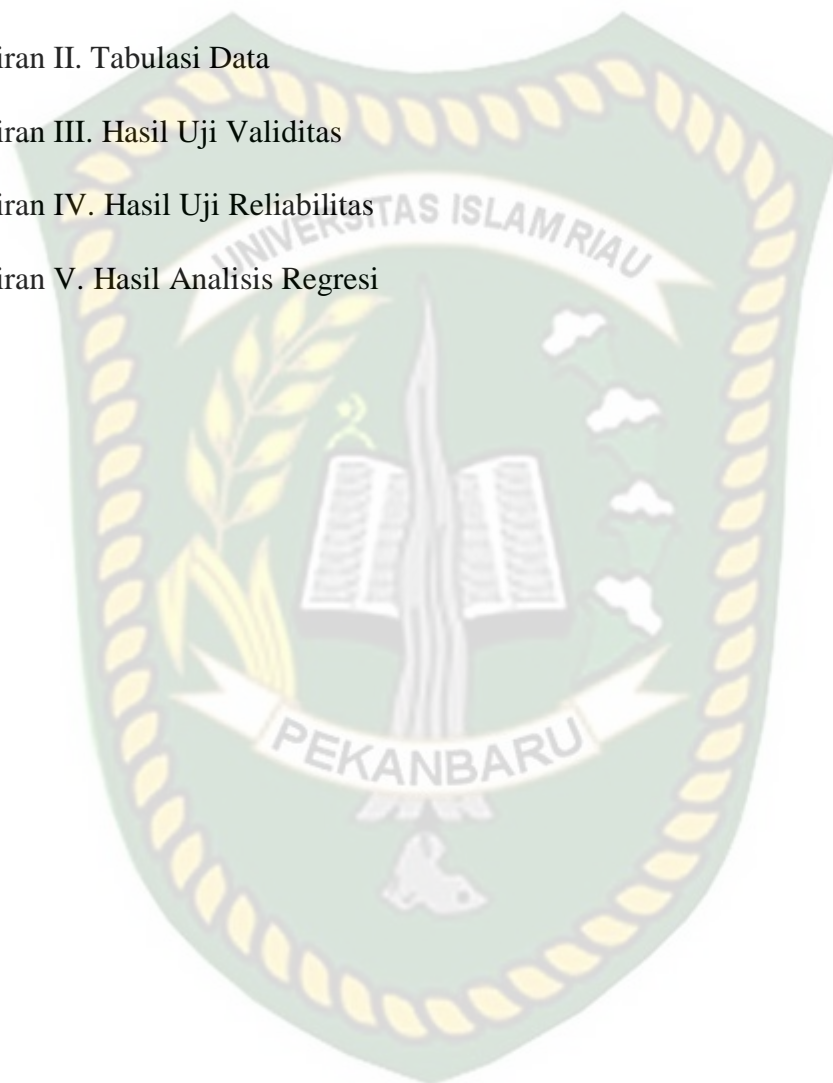
Lampiran I. Kuisisioner

Lampiran II. Tabulasi Data

Lampiran III. Hasil Uji Validitas

Lampiran IV. Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran V. Hasil Analisis Regresi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor usaha perbankan. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pembangunan di berbagai bidang usaha dan industri tentunya memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit, dan untuk itu peran sektor perbankan nasional sangat menentukan. Ambruknya bisnis perbankan tidak hanya merugikan dunia perbankan semata. Dampak yang lebih besar adalah berhentinya kehidupan sektor riil akibat berkurangnya suplai dana dari dunia perbankan kepada perusahaan yang bergerak di dunia bisnis, mulai dari usaha perdagangan, industri, peternakan, perumahan, keuangan, dan usaha-usaha lainnya juga mengalami kebangkrutan.

Pengelolaan perusahaan yang baik merupakan hal penting dan keharusan bagi setiap perusahaan, baik dalam dunia industri dan bisnis, juga termasuk dunia perbankan. Bank termasuk faktor yang mendukung perkenomian di Indonesia, yang berguna untuk menambah kekuatan dari industri perbankan nasional. Maka salah satu upaya meningkatkan kualitas perbankan adalah pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Bank sebagai *agent of development* diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang dapat membantu pemulihan perekonomian nasional melalui

penerapan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Budaya bisnis yang sehat dan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Rahayu dan Wahidin, 2014). *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan/guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (Wirada dkk., 2012). Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan dan perbankan.

Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

Hal ini disebabkan karena pengendalian internal dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir.

Baik buruknya *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal pada perusahaan. Organisasi Profesi Internal Auditor Indonesia yang terdiri dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) berkeyakinan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dan berkualitas mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen (Ayu, 2011). Jika sistem pengendalian internal berperan sebagaimana mestinya, maka inefisiensi dapat dieliminasi dan praktik-praktik tidak sehat dapat dihindarkan.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Saat ini di Kota Pekanbaru sudah terdapat sebanyak 16 unit BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas. Tingginya risiko dalam menjalankan aktivitas pada BPR seperti fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain sebagainya menuntut para pelaku bisnis keuangan pada BPR lebih berhati-hati, termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol internal yang berfungsi baik. Selain itu semakin ketatnya persaingan dalam sektor jasa keuangan, tenaga SDM yang dinilai masih belum begitu baik serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi

dalam operasional pelayanan BPR menuntut perlunya peningkatan dalam penerapan pelaksanaan GCG dalam industri BPR.

Fenomena dikeluarkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-104/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Indomitra Mega Kapital yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 118 Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017. Pencabutan izin ini dilakukan karena bank tersebut tidak bisa memperbaiki kondisi keuangannya setelah diawasi khusus oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai dengan batas waktu yang ditentukan (Abdul Latif, online : cakaplah.com diakses 29 Januari 2019). Data dari OJK Provinsi Riau selama setahun terakhir perkembangan BPR yang masih belum menggembirakan. Tercatat dalam setahun terakhir perkembangan aset pada akhir 2017 hanya mampu tumbuh 0,17 persen saja dibanding tahun 2016. Sementara disektor kredit mengalami pertumbuhan negatif 1,38 persen dibanding tahun 2016. Sedangkan perolehan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,19 persen. Tidak hanya itu, kinerja kurang menggembirakan juga tercatat pada rasio kredit bermasalah yang pada tahun 2016 sebesar 14,55 persen pada 2017 hanya mampu diminimalisir menjadi 12,9 persen (Ikhwanul Rubby, online : pekanbaru.tribunnews.com diakses 30 Januari 2019).

Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan BPR agar dapat menjaga kelangsungan (*survive*) dan demi meningkatkan kegiatan dan aktivitas dalam BPR. Penerapan GCG pada BPR merupakan sesuatu yang wajib diimplementasikan. Dengan berfungsinya pengendalian internal serta terwujudnya transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi dan kewajaran maka terwujudlah prinsip *Good Corporate Governance* yang semakin baik. Untuk itu, penerapan dan pelaksanaan GCG dalam dunia BPR harus mengikuti prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* secara total dan mutlak.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru. Penelitian Sari Yuliani (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal dan penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh pengendalian internal dan penerapan GCG terhadap kinerja manajerial pada BPR di Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini menghubungkan pengendalian internal terhadap penerapan GCG pada BPR di Kota Pekanbaru.

Kemudian saat ini masih terdapat perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai peranan pengendalian internal terhadap penerapan atau pelaksanaan GCG. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspita Ayu (2011) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dan BUMD se-Kota Bandung dan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rahayu (2014) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan GCG pada bank BUMN di Kota Bandung. Sedangkan penelitian Yuwono (2011) menyimpulkan bahwa peranan auditor internal tidak berpengaruh

terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berada di Jember.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul:

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau serta menambah pengetahuan serta memahami tentang

pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada BPR di Kota Pekanbaru.

- b. Bagi BPR di Pekanbaru, sebagai masukan berupa saran dalam peningkatan kualitas pengendalian internal, sejalan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan dalam menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan selanjutnya.
- c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.

D. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman, maka peneliti membagi kedalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang menjadi pengantar dan menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan responden penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN (OBJEK PENELITIAN)

Bab ini memberikan gambaran umum bank, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan oleh bank.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga saran penulis sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:180) pengendalian internal yaitu:

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Sedangkan menurut Warren dkk. (2015:400) pengendalian internal adalah: Prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Communication Of Sponsoring Organization atau COSO (Ayu:2011) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

- a. Effectiveness and efficiency of operation*
- b. Reliability of financial reporting*
- c. Compliance with applicable laws and regulations.*

Menurut Tuanakotta (2014:127) tujuan pengendalian internal merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, untuk mencapai suatu tujuan penegendalian. Sedangkan Mulyadi (2016:219) membagi tujuan pengendalian internal menjadi dua macam: pengendalian internal akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian internal administratif (*internal*

administrative control). Pengendalian internal akuntansi akan menjamin keamanan kekayaan investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal sebagai suatu tipe pengawasan diperlukan karena adanya keharusan untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Pengendalian yang dimaksud adalah setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan perusahaan dan sasaran yang ditetapkan. Pengendalian dapat bersifat preventif (mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan), atau direktif (mengarahkan kepada terjadinya hal-hal yang diinginkan).

Konsep pengendalian internal pada dasarnya terdiri dari 2 hal, yaitu tanggung jawab dan efisiensi pengendalian. Tanggung jawab pengendalian berkaitan dengan manajemen dan direktur yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menjaga proses pengendalian internal, meskipun auditor eksternal, auditor internal atau pihak lain memiliki perhatian terhadap pengendalian internal namun tanggung jawab utama tetap pada manajemen dan dewan direktur.

Efisiensi pengendalian diartikan sebagai pertimbangan antara manfaat dan biaya yang masuk akal atas pengendalian yang diterapkan. Apabila biaya suatu pengendalian itu lebih besar daripada manfaatnya, maka seharusnya manajemen tidak menerapkan pengendalian tersebut.

2. Komponen Pengendalian Internal

Commitee of Sponsoring Organization (COSO) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian internal terdiri yaitu meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assesment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*) (Lestari, 2014).

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian adalah efek kumpulan dari beragam faktor pada pembuatan, penguatan, atau mengurangi efektivitas dari kebijakan dan prosedur khusus. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian mengatur keseluruhan nada dari organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian karyawan. Lingkungan yang baik merupakan fondasi bagi semua komponen pengendalian intern, membangun disiplin dan struktur kontrol.

1. Integritas dan nilai-nilai etika.

Integritas dan nilai-nilai etika akan terjaga dengan baik apabila budaya perusahaan yang terbentuk mendukungnya. Budaya perusahaan meliputi keyakinan umum, dan perilaku dari para karyawan perusahaan. Apabila budaya perusahaan bermasalah, maka budaya perusahaan itu justru menghambat perilaku etis.

2. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen karyawan sangat penting untuk memfungsikan proses pengendalian internal.

3. Filosofi manajemen dan gaya operasi

Apabila manajemen meyakini bahwa pengendalian internal merupakan hal penting, maka kebijakan dan prosedur pengendalian yang efektif akan diterapkan. Kesadaran akan pentingnya pengendalian tersebut akan dikomunikasikan ke bawahan melalui gaya operasi.

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi ditentukan oleh pola otorisasi dan tanggung jawab dalam perusahaan.

5. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Kebijakan sumber daya manusia meliputi pembagian tugas, penyeliaan dan rotasi jabatan. Tanggung jawab atas tugas tertentu harus jelas dan tertulis dalam manual dan deskripsi pekerjaan. Penyeliaan merupakan pemantauan secara langsung terhadap kinerja karyawan. Rotasi jabatan membuat karyawan dapat memeriksa atau memverifikasi pekerjaan karyawan lain selama melaksanakan tugas tertentu.

- b. Penilaian Resiko (*risk assessment*)
Penilaian resiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengatur dan mengelola resiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dimana organisasi berkecimpung. Semua badan usaha menghadapi beragam resiko baik dari sumber luar maupun internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir atau dinilai. Sebagai prasyarat bagi penilaian resiko yaitu adanya penetapan sasaran dan tujuan, dari berbagai tingkatan dalam organisasi yang saling berhubungan dan konsisten. Penilaian resiko ini merupakan resiko proses pengidentifikasian dan analisis resiko yang ada hubungannya dengan pencapaian tujuan.
- c. Aktivitas Pengendalian (*control activities*)
Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu menjamin bahwa arahan manajemen dijalankan, meminimalkan resiko, ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan pencapaian tujuan dengan efektif. Kegiatan pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada.
1. Pengendalian aliran pekerjaan
Pengendalian aliran pekerjaan berfokus pada tanggung jawab atas kejadian, urutan kejadian, dan aliran informasi antara kejadian. Contohnya pembagian tugas yang meliputi fungsi otorisasi fungsi pencatatan dan fungsi dan fungsi penanganan aset.
 2. Pembatasan akses ke aset dan informasi
Cara paling penting untuk mengamankan aset adalah dengan membatasi akses hanya bagi karyawan yang mengerjakan tugasnya.
 3. Rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik aset.
Aktivitas rekonsiliasi digunakan untuk menjamin bahwa kejadian yang direkam dan data berhubungan dengan aset fisik.
 4. Review kinerja
Review kinerja meliputi analisis kinerja, identifikasi masalah, dan tindakan koreksi.
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Menurut COSO informasi yang diperlukan harus dapat diidentifikasi, direkam dan dikomunikasikan dalam bentuk dan rentang waktu yang memungkinkan semua pihak terkait untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunaannya untuk menjalankan dan mengendalikan usaha. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir ke bawah, melintasi berbagai tingkatan organisasi dan juga ke atas. Semua pegawai harus menerima informasi atau pesan dari manajemen secara jelas yang menegaskan bahwa tanggung jawab menjalankan pengendalian harus dilakukan secara sangat serius.

- e. Pemantauan (monitoring)
Menurut COSO sistem pengendalian intern perlu dipantau, yaitu proses untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha.

3. Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Warren dkk. (2015:406) sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak. Hal ini disebabkan karena terdapatnya elemen manusia dan pertimbangan biaya-manfaat didalam pengendalian internal tersebut.

- a. Elemen manusia
Elemen manusia mengakui bahwa pengendalian yang diterapkan dan digunakan oleh manusia. Akibatnya, kesalahan manusia dapat terjadi karena kelelahan, kecerobohan, kebingungan atau salah perhitungan.
- b. Pertimbangan biaya-manfaat
Pertimbangan biaya manfaat mengakui bahwa biaya pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaatnya.

4. Good Corporate Governance

Semenjak krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Semenjak itulah semua pihak sepakat Indonesia harus mulai dengan tata kelola pemerintah, perusahaan pemerintah, dan swasta (Soedijatno, 2013). *Organisation for Economic Coperation and Development* atau OECD dalam Djohanputro (51:2013) mendefinisikan bahwa tata kelola atau *corporate governance* yaitu:

Seperangkat hubungan antara manajemen korporasi, dewan komisaris dan direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dengan struktur

untuk menetapkan tujuan korporasi, cara untuk mencapai tujuan tersebut dan cara memonitor kinerja.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah:

Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Mathiese (2002) yaitu:

Sebuah area di bidang ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan bagaimana memastikan dan memotivasi manajemen korporasi yang efisien dengan mekanisme insentif, seperti kontrak, desain organisasi dan peraturan organisasi.

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikemukakan diatas berbeda namun memiliki maksud yang sama. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah sistem atau seperangkat aturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan *stakeholders* disuatu perusahaan. GCG tidak hanya sebagai suatu pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.

5. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran (Ardhiyanto, 2017).

- a. *Transparency* (Transparansi)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas)
Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
- d. *Independency* (Independen)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. *Fairness* (Kewajaran)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Corporate governance mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, *board of directors*, dan investor, serta pihak-pihak terkait lainnya. Prinsip transparansi mengahruskan pemilihan *board of directors* atau akuisisi yang mengakibatkan peralihan pengendalian perusahaan atau transaksi materiil lainnya seperti merger dan penjualan aset harus harus diungkapkan kepada pemegang saham serta investor.

Transparansi (*transparency*) dapat dilakukan dengan peningkatan keterbukaan perusahaan melalui penyampaian informasi secara akurat dan tepat waktu, serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen (*accountibility*). Perusahaan juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat (*responsibility*). Prinsip kewajaran (*fairness*) yaitu perusahaan memberikan perlakuan yang sama baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas sehingga pemegang saham minoritas dapat terlindungi dari *insider trading* dan konsentrasi pembiayaan terhadap kelompok tertentu yang dikuasai pemegang saham mayoritas.

6. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* (GCG) dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik (Kurnia, 2014).

7. Unsur-unsur *Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011:41) unsur-unsur *corporate governance* berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada diluar perusahaan yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance*.

- a. Internal perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari dalam adalah:
 1. Pemegang saham
 2. Direksi
 3. Dewan komisaris
 4. Manajer
 5. Karyawan
 6. Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
 7. Komite audit
- b. Eksternal perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan:
 1. Undang-undang dan perangkat hukum
 2. Investor
 3. Institusi penyedia informasi
 4. Akuntan publik
 5. Institusi yang memihak publik
 6. Pemberi pinjaman
 7. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

8. Model *Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011:43) *corporate governance* dapat dikelompokkan menjadi 3 model yaitu:

- a. *Principial-agent model*
Principial-agent model atau dikenal dengan *agency theory* yaitu dimana korporasi dielola untuk memberikan *win-win solution* bagi pemegang saham (*principial*) dan manajer (*agent*). Dalam model ini *corporate governance* suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentimen pasar.
- b. *The myopic market model*
Masih memfokuskan perhatian pada kepentingan pemegang saham dan manajer, dimana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar *corporate governance*. Oleh karena itu *principial* dan *agent* lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
- c. *Stakeholder model*
Model ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam

lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya masalah etika dan moral, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

9. Dampak Tidak Dilaksanakannya *Good Corporate Governance*

Menurut Wardani (Yuliani, 2017) penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi tuntutan dalam dunia usaha saat ini. Jika suatu perusahaan tidak menerapkan *Good Corporate Governance* maka beberapa kemungkinan dampak yang timbul yaitu:

- a. Dampak Yuridis
 - i. Ketidakpercayaan pemegang saham yaitu dengan adanya indikasi melemahnya harga saham.
 - ii. Ketidakpercayaan karyawan yaitu dengan adanya indikasi tidak dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
 - iii. Ketidakpercayaan publik yaitu dengan indikasi publik tidak mau menggunakan produk perusahaan yang nantinya berdampak pada kebangkrutan perusahaan.
 - iv. Ketidakpercayaan kreditur yaitu dengan indikasi timbulnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.
- b. Dampak Hukum
 - i. Ancaman sanksi pidana atas tuduhan manipulasi maupun penggelapan pajak atau penyebaran berita bohong terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembukuan yang benar.
 - ii. Ancaman gugatan perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat aktivitas perusahaan terkait.

10. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*

Pengendalian intern merupakan salah satu unsur dasar untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, selain itu juga sebagai pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya *check and balance* yang memadai, yaitu adanya sistem pengendalian yang kuat. Selain itu juga, *Good Corporate Governance* merupakan sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan (Kurnia, 2014).

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak dapat menghapus atau mengabaikan pentingnya sistem pengendalian internal, sebab sistem pengendalian internal dapat membantu terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Sistem pengendalian internal yang baik juga dapat membantu menyediakan data dan menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan tepat pada waktunya.

11. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti / tahun	Topik Penelitian	Variabel Yang Dipergunakan	Hasil Penelitian
1.	Chandra S. Yuwono (2011)	Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada BUMN Jember.	Audit Internal (X), <i>Good Corporate Governance</i> (Y).	Penelitian ini menunjukkan peranan Audit Internal tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMN Jember .
2.	Siti Kurnia (2013)	Pengaruh Audit Internal Dan Pelaksanaan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank BUMN di Kota Bandung	Audit Internal (X1), Pengendalian Internal (X2), <i>Good Corporate Governance</i> (Y)	Audit Internal dan Pengendalian Internal secara bersama-sama memberikan pengaruh sangat kuat terhadap pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> . Diantara kedua variabel tersebut Pengendalian Internal lebih memberikan pengaruh dominan daripada Audit Internal.
3.	Puspita Ayu (2012)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap	Audit Internal (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2),	Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal berpengaruh positif dalam

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan penelitian dan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Bank BPR di Kota Pekanbaru.

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan variabel-variabel tersebut maka variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal (X). Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Sedangkan variabel dependennya yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (Y). *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Untuk lebih jelasnya variabel-variabel beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Sistem Pengendalian Internal (X)	Lingkungan pengendalian (<i>control envirointment</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas dan nilai-nilai etika 2. Filosofi dan gaya manajemen 3. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab nya 4. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia 	Ordinal
	Penilaian Risiko (<i>risk assesment</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan analisis risiko 2. Pengelolaan risiko yang relevan 	Ordinal
	Aktivitas pengendalian (<i>activity control</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian terhadap mitigasi risiko 2. Pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian atas teknologi 3. Penetapan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur kedalam tindakan. 	Ordinal
	Informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian dan pengungkapan 2. Eksistensi 3. Kelengkapan, keakuratan, dan ketepatan waktu 	Ordianal
	Pengawasan (<i>monitoring</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas kinerja pengendalian internal 	Ordinal
<i>Good Corporate Governance</i> (Y)	Tranparansi (<i>transparency</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi yang sama kepada pemegang saham dan non pemegang saham 	Ordinal

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempublikasikan laporan keuangan beserta hasil analisis manajemen khususnya di internet 3. Memberikan laporan RUPS secara rinci dan transparan 	
	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman <i>corporate governance</i> yang tertulis secara rinci 2. Memiliki pedoman etik dan tingkah laku (<i>code of conduct</i>) yang tertulis serta di distribusikan kepada karyawan dan pemegang saham 	Ordinal
	Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemberitahuan RUPS tahunan kepada pemegang saham 2. Mendorong pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suaranya pada RUPS 3. Menyediakan informasi keuangan dan non keuangan bagi pemegang saham 	Ordinal
	Kemandirian (<i>independent</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan yang relevan sebagai pedoman perusahaan 2. Adanya standar profesional sebagai landasan personil perusahaan 3. Tidak adanya tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai Undang-Undang 	Ordinal

	Kewajaran (<i>fairness</i>)	i. Pemegang saham memiliki kedudukan yang setara dalam perusahaan	Ordinal
--	----------------------------------	---	---------

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank BPR yang berlokasi di Kota Pekanbaru yang berjumlah 16 Bank BPR berdasarkan data dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian sensus. Dari setiap Bank BPR akan diambil responden sebanyak 3 orang yaitu direktur, manajer/kepala bagian Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan manajer/kepala bagian akuntansi. Sehingga total keseluruhan responden yang diambil adalah sebanyak 48 orang,

Tabel III.2
Populasi Penelitian

NO	NAMA BANK	RESPONDEN
1	PT. BPR Artha Margahayu	3
2	PT. BPR Payung Negeri Bestari	3
3	PT. BPR Unisritama	3
4	PT. BPR Mitra Rakyat Riau	3
5	PT BPR Tuah Negeri Mandiri	3
6	PT BPR Pekanbaru	3
7	PT BPR Mandiri Jaya Perkasa	3
8	PT BPR Harta Mandiri	3
9	PT BPR Delta Dana Mandiri	3
10	PT BPR Tunas Mitra Mandiri	3
11	PT BPR Duta Perdana	3
12	PT. BPR Anugerah Bintang Sejahtera	3
13	PT BPR Fianka Rezalina Fatma	3
14	PT BPR Arsham Sejahtera	3
15	PT BPR Prima Riau Sentosa	3
16	PT BPR Putra Mahkota Mandiri	3
	TOTAL	48

Sumber : situs resmi Otoritas Jasa Keuangan

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka, pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikannya kepada peneliti. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan peneliti sendiri. Cara penyampaian kuesioner yaitu peneliti mengantarkan secara langsung kepada responden penelitian.

F. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi pearson (*Pearson Correlation*) dan setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan. Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Suatu pernyataan dikatakan valid jika koefisien korelasi (t_{hitung}) lebih besar dari nilai kritis (t_{tabel}). Selain itu, jika nilai *level of significane* lebih besar dari 0,05 (5%) maka instrumen dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas data dimaksudkan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran beberapa kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Tingkat realibilitas memperhatikan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya sehingga hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang-ulang terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbanch's Alpha*, suatu instrumen dapat dikatakan realibel apabila *Cronbanch's Alpha* lebih besar 0,60.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------|
| 1 = Tidak Pernah | 4 = Sering |
| 2 = Jarang | 5 = Selalu |
| 3 = Kadang | |

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif terdiri dari demografi responden dan variabel penelitian. Statistik deskriptif demografi responden digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: jenis kelamin, masa kerja, umur, dan tingkat pendidikan. Sedangkan statistik deskriptif variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai deskripsi variabel penelitian yang disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi memaparkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

2. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi

normal, yaitu distribusi data tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Penelitian ini menggunakan analisis grafik dengan menggunakan *histogram* dan *normal P-P Plots* dan uji statistik dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji apakah distribusi data telah mengikuti atau mendekati distribusi.

H. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana (*multiple regression*) dengan menggunakan program SPSS (*Statistical package For Social Science*). Model analisis linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y=a+bX+e$$

Keterangan :

- Y = Variabel dependen yaitu penerapan GCG
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X = Variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal
- e = Error (Tingkat kesalahan maksimum).

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah:

- i. Jika tingkat sig > 0,05 maka hipotesis ditolak, ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- ii. Jika tingkat sig < 0,05 maka hipotesis diterima, ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Setiap perusahaan pasti memiliki sejarah masing-masing yang membedakan dengan perusahaan lainnya. Berikut ini mendeskripsikan sejarah perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi sampel pada penelitian ini secara umum.

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang memiliki arti tempat penukaran uang. Kemudian menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kegiatan perbankan yaitu “menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.” Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok pada perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanya merupakan kegiatan pendukung pada perbankan. Kegiatan menghimpun dana yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang dapat berbentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito yang kemudian biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah. Kegiatan menyalurkan dana yakni berupa memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk

lainnya. Sedangkan kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya yaitu diberikan untuk mendukung kelancaran kedua kegiatan utama tersebut.

Bank pertama kali terbentuk pada 1690 dan pada saat itu masih berbentuk sebuah firma pada umumnya. Dalam sejarahnya asal mula dikenalnya perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di Eropa, yang mana kemudian usaha perbankan berkembang ke Asia dan Amerika. Dalam sejarah perbankan kata bank dikenal sejak adanya jasa penukaran uang sehingga bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.

Di Indonesia praktek kegiatan jasa perbankan telah tersebar dari perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia dapat berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selama ini kondisi dunia perbankan di Indonesia juga telah mengalami banyak perubahan. Selain karena perkembangan yang berasal dari dunia perbankan itu sendiri atau secara internal, perubahan pada dunia perbankan juga tidak terlepas dari perkembangan eksternal seperti kondisi sektor riil perekonomian, politik, hukum dan sosial.

Sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia berawal sejak abad 19 pada saat masa kolonial penjajahan Belanda yakni dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa, yang dibentuk dengan tujuan membantu petani, pegawai, dan buruh agar dapat terlepas dari jeratan rentenir yang membebani dengan bunga yang sangat tinggi.

Pada masa itu BPR dikenal oleh masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan atau Bank Dagang Desa yang pada saat itu hanya

terdapat di Jawa dan Bali. Pada tahun 1929 telah berdiri badan khusus yang menangani kredit di pedesaan, yaitu Badan Kredit Desa (BKD) yang terdapat di Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan pada saat itu pemerintah kolonial membentuk suatu lembaga instansi yang bernama Instansi Kas Pusat (IKP).

Setelah Indonesia merdeka pemerintah mendorong pendirian bank terutama di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para pedagang pasar. Setelah dikeluarkannya "Pakto 1988" pada 27 Oktober 1988 bank-bank pasar tersebut kemudian berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada masa tersebut masih terdapat beberapa lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) Jawa Timur, Lumbung Pitih Negeri (LPN) Sumatera Barat, dan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Bali.

Sebagai kelanjutan "Pakto 1988" tersebut pemerintah terus menyempurnakan beberapa regulasi dan kebijakan perbankan sebelumnya. Pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyempurnakan undang-undang sebelumnya. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas dinyatakan bahwa jenis bank di Indonesia adalah Bank Umum dan BPR.

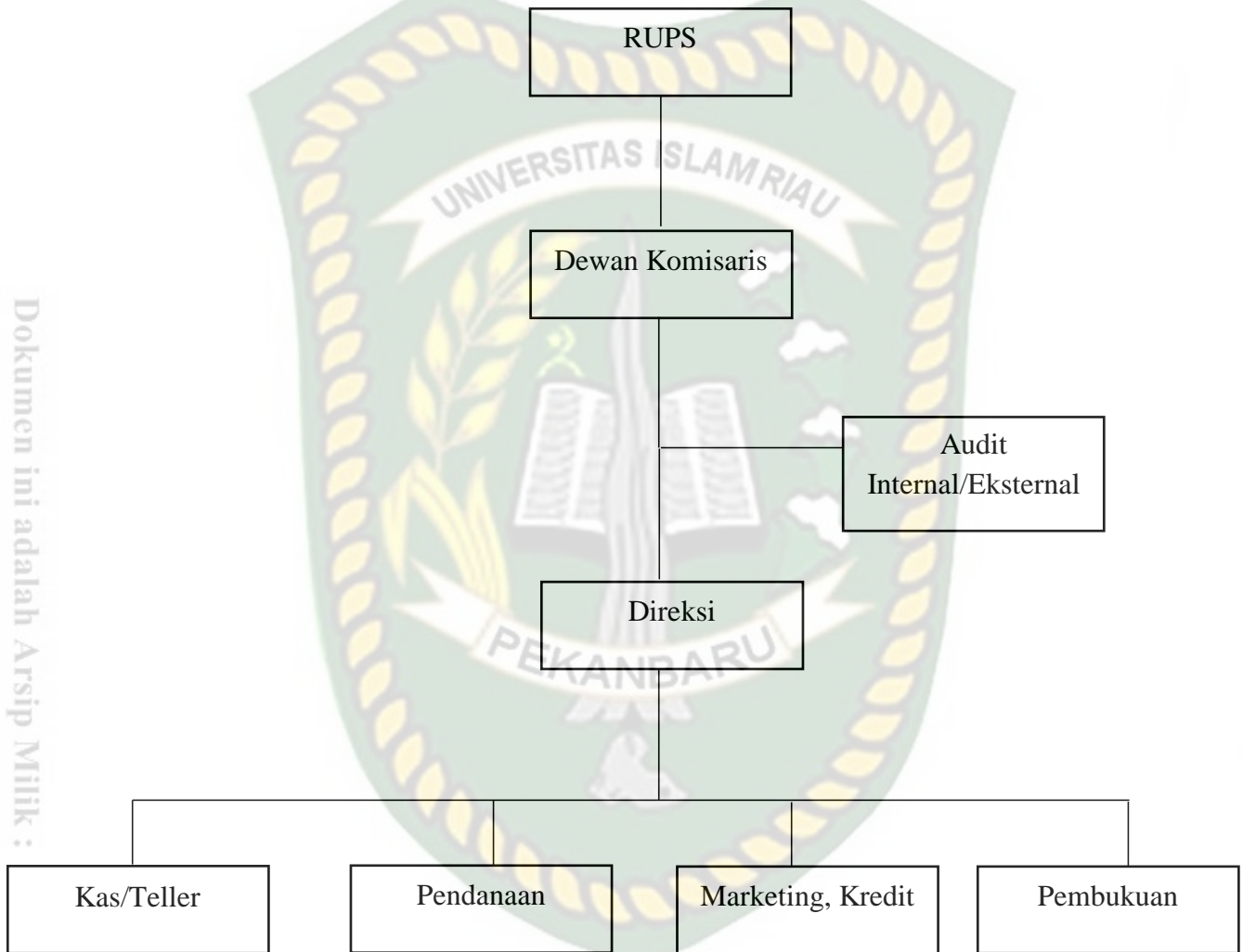
1. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal oleh masyarakat melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga stabilitas daerah di Kota Pekanbaru. BPR merupakan lembaga resmi yang diatur oleh undang-undang yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya serta menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi.

B. Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat

Struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 26/KEP/DIR pada 29 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi BPR



RUPS merupakan lembaga tertinggi pada internal BPR. RUPS merumuskan strategi dan kebijakan strategis yang akan diambil oleh organisasi. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham dan pemilik bank untuk melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas organisasional dan operasional

bank, agar sesuai dengan hasil keputusan RUPS, rambu-rambu dan peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila BPR memiliki nilai aset diatas 10 Milyar Rupiah maka sesuai ketentuan BI laporan pertanggungjawaban keuangan BPR wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Jumlah direksi pada BPR sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang. Pada BPR berskala volume besar, direksi BPR dapat dibantu oleh Kepala Bagian Operasional.

C. Aktivitas Bank Perkreditan Rakyat

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melaksanakan berbagai jenis aktivitas. Aktivitas bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Aktivitas bank yang paling pokok yaitu membeli uang dengan cara menghimpun dana masyarakat kemudian menjual uang tersebut dengan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Dari aktivitas jual-beli inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Selain itu aktivitas bank lainnya dalam rangka mendukung penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat adalah memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Dalam pelaksanaannya aktivitas bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank jelas memiliki ciri-ciri tersendiri dalam pelaksanaan operasional usahanya, misalnya antara bank umum dan bank perkreditan rakyat jelas mempunyai aktivitas dan tugas yang berbeda.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dalam melaksanakan aktivitasnya baik secara konvensional ataupun syariah tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Jika dibandingkan dengan bank umum, aktivitas operasional usaha BPR jauh lebih kecil dan sempit. Adapun aktivitas terlarang untuk dilakukan oleh BPR dalam menjalankan usahanya yaitu:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro
2. Mengikuti kliring
3. Melaksanakan jual beli valuta asing
4. Melaksanakan kegiatan perasuransian

Bentuk-bentuk kegiatan yang diperbolehkan bagi BPR meliputi hal-hal berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito
2. Menyalurkan kredit pinjaman kepada masyarakat

D. Asas dan Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank yang aktivitas usahanya ditujukan terutama untuk melayani pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat yang berlokasi di daerah pedesaan. BPR dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) atau Koperasi.

BPR dalam aktivitas usahanya dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Fungsi perizinan, fungsi pengawasan dan pembinaan pada BPR saat ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 48 eksemplar. Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung pada 16 Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru. Responden pada penelitian ini adalah Direktur, Manajer/Kepala Bagian Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajer/Kepala Bagian Akuntansi. Penyebaran kuesioner dimulai tanggal 29 Juli 2019 dan keseluruhan kuesioner kembali pada 9 Agustus 2019. Jumlah kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 33 eksemplar. Seluruh kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu sebanyak 33 eksemplar. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1
Tingkat Pengumpulan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebarakan	48	100%
Total kuesioner yang terkumpul kembali	33	68,75%
Total kuesioner yang tidak terkumpul kembali	15	0%
Total kuesioner yang dapat diolah	33	68,75%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan dari tabel dapat dijelaskan bahwa peneliti mengirimkan 48 kuesioner, kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 33 eksemplar atau 68,75%. Kuesioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 15 eksemplar atau 31,25%. Jadi

total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarakan adalah 33 eksemplar atau 68,75%.

Tabel V.2
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	15	45,46%
Wanita	18	55,54%
Pendidikan Terakhir		
SMA/Sederajat	1	3,04%
Diploma	6	18,18%
Sarjana	26	78,78%
Lama Bekerja		
1-5 tahun	14	42,43%
6-10 tahun	9	27,27%
> 10 tahun	10	30,30%
Umur		
< 30 tahun	4	12,12%
31-40 tahun	21	63,64%
> 40 tahun	8	24,24%

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel V.2 dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh wanita yaitu 55,54 % dan pria 45,46 %, sedangkan tingkat pendidikan responden yaitu Sarjana dengan persentase 78,78 %, Diploma 18,18 % dan SMA/Sederajat 3,04 %. Sedangkan dari lama nya bekerja

responden 1-5 tahun dengan persentase 42,43 %, 6-10 tahun dengan persentase 27,27 % dan > 10 tahun dengan persentase 30,30 %. Dari tingkat umur responden < 30 tahun dengan persentase 12,12 %, 31-40 tahun dengan persentase 63,64% dan > 40 tahun dengan persentase 24,24 %.

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance*. Berdasarkan hasil kuesioner tabel V.3 *descriptive statistic* memperlihatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.3
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	33	106	135	125,94	8,789
GCG	33	55	70	65,18	4,475
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Dalam tabel V.3 terlihat bahwa untuk sistem pengendalian internal dari 33 responden mempunyai nilai minimum sebesar 106, nilai maksimum sebesar 135 dengan nilai rata-rata sebesar 125,94 dan standar deviasi 8,789. Untuk *good corporate governance* dari 33 responden mempunyai nilai minimum sebesar 55, nilai maksimum sebesar 70 dengan nilai rata-rata sebesar 65,18 dan standar deviasi 4,475.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas (Ketepatan)

Validitas ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen dinyatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel V.4 sebagai berikut:

Tabel V.4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
<i>Good Corporate Governance</i>	0,474** -0,900**	Valid
Sistem Pengendalian Internal	0,478** -0,812**	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel V.4 dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi signifikan pada level 0,05 sehingga seluruh kuesioner dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *realibity analyze* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *cronchbach's alpha* lebih dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel V.5 sebagai berikut:

Tabel V.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's alpha	Kesimpulan
<i>Good Corporate Governance</i>	15	0,752	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	28	0,756	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2019

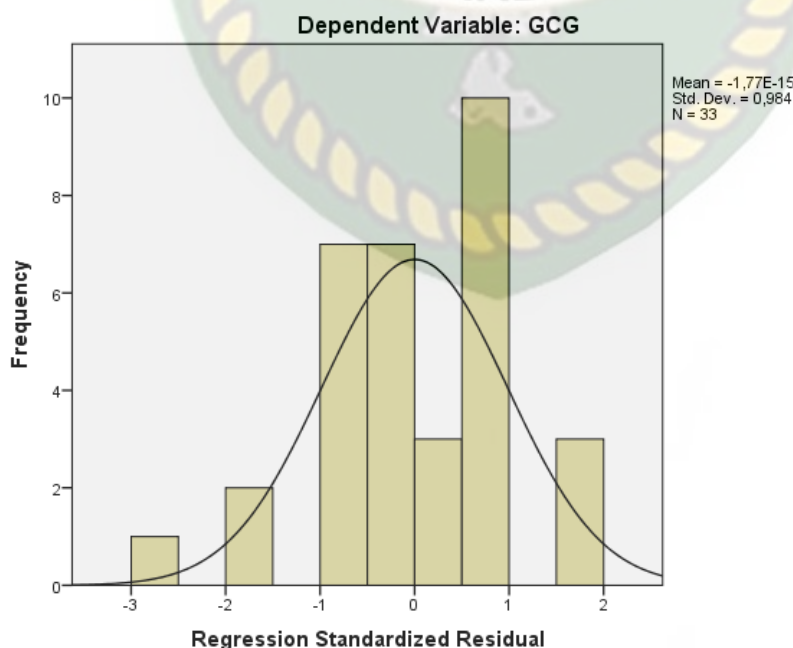
D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram, *Normal Probability*, dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Untuk melihat normalitas data dapat dilihat pada gambar V.1.

Gambar V.1

Histogram



Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Histogram pada gambar V.1 telah memperlihatkan posisi normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan tepat ditengah, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Untuk memperjelas normalitas data, dapat juga dilihat pada tabel V.6 berikut:

Tabel V.6
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,03748252
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,104
	Negative	-,118
Kolmogorov-Smirnov Z		,676
Asymp. Sig. (2-tailed)		,751

a. Test distribution is Normal.

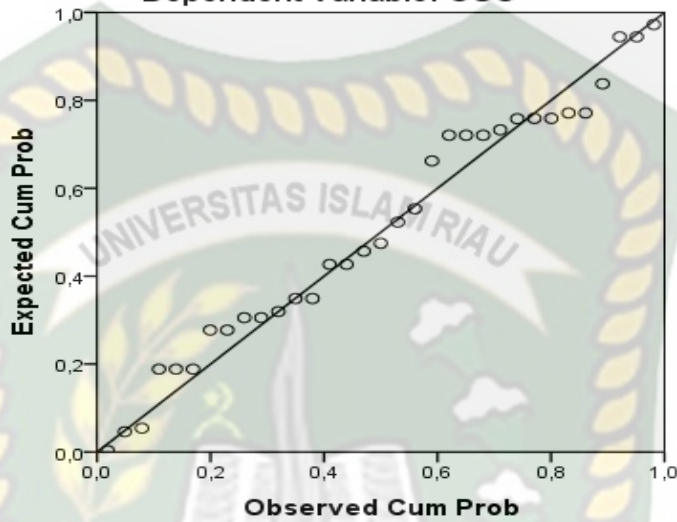
b. Calculated from data.

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Pada tabel V.6 terlihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,884 yang artinya data penelitian ini berdistribusi normal. Untuk lebih memperjelas hasil

normalitas dapat dilihat dengan hasil uji Normal Probabilty Plot pada gambar V.2 berikut:

Gambar V.2
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: GCG



Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan gambar V.2 dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

E. Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good corporate governance*. Hasil analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

Tabel V.7

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,087	7,836		2,308	,028
SPI	,374	,062	,734	6,025	,000

a. Dependent Variable: GCG

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 18,087 + 0,374X$$

Hasil dari persamaan regresi diatas adalah:

- a. Nilai konstanta sebesar 18,087 artinya jika Sistem Pengendalian Internal bernilai 0 (nol) maka penerapan *Good Corporate Governance* bernilai 18,087.
- b. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X) bernilai positif yaitu 0,374 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1 maka akan mengakibatkan penerapan *good corporate governance* meningkat sebesar 0,374.

F. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerapan *good corporate governance*. Untuk melakukan pengujian hipotesis ini maka dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru.

Ha: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 21 dapat dilihat pada tabel V.8 sebagai berikut:

Tabel V.8

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	345,667	1	345,667	36,295	,000 ^b
	Residual	295,242	31	9,524		
	Total	640,909	32			

a. Dependent Variable: GCG

b. Predictors: (Constant), SPI

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Dari uji ANOVA dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good corporate governance* menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari uji ANOVA pada tabel V.8 yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 36,925 dengan tingkat signifikan 0,000.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Kurnia (2013) dan Puspita Ayu (2012). Pengendalian intern

merupakan salah satu unsur dasar untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, selain itu juga sebagai pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya *check and balance* yang memadai, yaitu adanya sistem pengendalian yang kuat. Ini berarti dengan ditingkatkannya pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan BPR maka diharapkan penerapan *good corporate governance* pun akan meningkat.

H. Koefisien Determinasi

Hasil uji hipotesis variabel independen yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerapan *good corporate governance* sebesar 0,539 dapat dilihat pada tabel V.9 berikut:

Tabel V.9

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,734 ^a	,539	,524	3,086

a. Predictors: (Constant), SPI

b. Dependent Variable: GCG

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan nilai *R Square* menunjukkan bahwa kontribusi sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good corporate governance* adalah sebesar 0,539 atau 53,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*. Sedangkan 0,461 atau 46,10% ditentukan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 53,90% sedangkan 46,10% ditentukan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang menerapkan *good corporate governance* harus memperhatikan sistem pengendalian internal karena akan berpengaruh langsung terhadap baik atau buruknya penerapan *good corporate governance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk menambahkan variabel penelitian lainnya, atau memperluas sampel pada Bank Perkreditan Rakyat di wilayah yang lain sehingga daya generalisasi penelitian dapat diperluas.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai praktek penerapan *good corporate governance* pada industri perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Adrian. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika
- Ardhianto, W. (2017). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Skripsi: Universitas Hasanuddin.
- Badri, S. (2012). Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Djohanputro, B. (2013). Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi. Jakarta: Penerbit PPM.
- Latif, A. (2017). <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/06/15/izin-operasi-bpr-indomitra-mega-kapital-pekanbaru-dicabut#sthash.gbmpbOnp.3E95AWa1.dpbs>.
- Lestari, T. A. (2014). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN di Kota Bandung. Jurnal Fakultas Ekonomi: Universitas Komputer Indonesia.
- Mulyadi. (2010). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K., & Wahidin. (2014). Pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank BUMN di Kota Bandung. Jurnal Fakultas Ekonomi: Universitas Komputer Indonesia.
- Rubby, I. (2018). <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/21/peringatan-bpr-dan-bprs-nasional-beginilah-fakta-perkembangannya-saat-ini>.
- TMBooks. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Trihendradi, C. (2013). Langkah Mudah Menguasai SPSS 21. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Tuanakotta, T. M. (2014). Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2015). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Wirda, Darwanis, & Jallaludin. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Perbankan di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi: Universitas Syiah Kuala.

Yuliani, S. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Manajerial pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru. Skripsi: Universitas Islam Riau.

Yuwono, C. S. (2011). Pengaruh Peranan Auditor Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN Jember. Skripsi: Universitas Jember.

Surat Keputusan Menteri BUMN -117/M-MBU/2002 Pasal 2 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

